



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Beban di Pundak Penjabat Gubernur

JAKARTA, KOMPAS — Calon penjabat gubernur DKI Jakarta diharapkan melanjutkan program kerja, menjaga kestabilan politik di Ibu Kota, serta mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketiganya demi menyelesaikan persoalan sehari-hari yang masih mendera kota Jakarta.

Lembaga survei Pusat Data Bersatu, Kamis (29/9/2022), merilis hasil survei terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria yang akan menyelesaikan pengabdian pada 16 Oktober 2022.

Hasil survei melalui telepon kepada 400 responden dengan nirpencuplikan 5 persen itu, antara lain, 83,8 persen responden (mayoritas 17-25 tahun) puas terhadap kinerja Anies-Riza. Mereka puas terhadap pembangunan infrastruktur, tata kelola perkotaan, dan layanan transportasi umum.

Namun, dalam survei yang sama pula, responden mengharapkan calon penjabat gubernur yang tidak terasiasikan dengan kelompok tertentu. Calon yang independen dan profesional diharapkan dapat menyelesaikan persoalan sehari-hari yang masih mendera kota Jakarta.

"Mereka puas adanya penambahan koridor Transjakarta dan perbaikan halte. Tetapi, responden mengingatkan masih ada pekerjaan rumah mengatasi dampak ekonomi akibat Covid-19," ucap Syarifudin, peneliti Pusat Data

Bersatu, kemarin.

Posisi penjabat gubernur strategis selama dua tahun ke depan untuk mengatasi warisan masalah yang belum selesai dan melaksanakan atau menyelesaikan program kerja gubernur sebelumnya.

Agus Herta Sumarto, peneliti Institute for Development of Economics and Finance, menyebutkan, hasil survei menunjukkan warga sudah rasional. Mereka puas, tetapi sadar masih ada masalah yang belum selesai.

"Sosok penjabat gubernur harus mampu diterima semua lapisan masyarakat karena kestabilan politik turut memengaruhi situasi ekonomi," katanya.

Di sisa waktu dua tahun ini, penjabat gubernur diharapkan melanjutkan program kerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022. Juga bekerja keras menjaga pertumbuhan ekonomi Jakarta sebagai barometer nasional.

Agus mengatakan, program pengendalian banjir merupakan salah satu yang terhambat atau terkendala selama pandemi Covid-19. Sebagian besar program masih dalam tahap pengerjaan sehingga penjabat gubernur harus mengawalinya. "Masalah lain menekan angka kemacetan dan menggenjot transportasi publik. Calon penjabat gubernur harus tuntas atau lanjutkan programnya," ucapnya.

Profesional

Rapat pimpinan gabungan di Gedung DPRD DKI Jakarta,

Selasa (13/9), telah mengusulkan tiga nama calon penjabat gubernur. Ketiganya adalah Heru Budi Hartono, saat ini menjabat Kepala Sekretariat Presiden dan pernah menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta; Marullah Matali yang menjabat Sekdaprov DKI Jakarta; serta Bahtiar, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan pernah menjabat Penjabat Sementara Gubernur Kepulauan Riau.

Menurut Alwan Ola Riantoby, pegiat pemilu, Jakarta membutuhkan sosok penjabat gubernur yang cakap birokrasi dan juga mampu memahami sosial kulutral. "Tidak partisan dan mengayomi sehingga bisa menghadirkan modernitas," katanya.

Priyo Budi Santoso, politikus, menambahkan, penjabat gubernur akan menghadapi banyak tantangan. Jam terbang atau pengalamannya harus tinggi atau baik.

"Harus diingat APBD terbesar, duitnya jumbo, angka ketok palu Rp 82,4 triliun. Maksimalkan untuk perbaikan Jakarta," katanya.

Selain mengelola APBD, calon penjabat gubernur akan menghadapi birokrasi yang besar dari provinsi hingga wilayah administratif. Birokrasi tersebut mesti bekerja optimal dan maksimal, terutama dalam pelayanan warga.

Priyo menuturkan, calon penjabat gubernur juga harus menyiapkan transisi Jakarta melepas status Ibu Kota ke

Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Persiapan tersebut meliputi undang-undang sebagai Ibu Kota Negara dan segala dampaknya.

Jakarta bakal ditinggal sebagian aparatur sipil negara dan warga. Perpindahan tersebut meninggalkan tempat-tempat kosong yang mesti dikelola agar ekonomi tetap berjalan.

"Jakarta harus tetap berkontribusi ke pemerintah pusat, apalagi Jakarta barometer nasional," katanya.

Lima kriteria

Sebelumnya, pegiat demokrasi dan pemilu dalam diskusi di lembaga kajian kebijakan independen PARA Syndicate menyarankan lima kriteria pengganti Anies. Penjabat gubernur seharusnya memahami kompleksitas Ibu Kota, berpengalaman sebagai birokrat, mampu menjembatani komunikasi pusat dan daerah, inklusif, serta berorientasi pada kepentingan rakyat (*Kompas*, 9 September 2022).

Arif Susanto, analis politik dari Exposit Strategic, menyebutkan, penjabat gubernur mesti memahami Ibu Kota dengan segala persoalan keseharian, ekonomi, dan posisi sebagai barometer nasional. Atas dasar itu, sangat riskan memilih penjabat yang belum mengenal Jakarta.

"Penjabat sejak hari pertama harus langsung bekerja karena masanya hanya dua tahun. Tidak ada waktu basa-basi atau harus belajar terlebih dahulu," kata Arif. (DAN)